

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA TERHADAP ANGKA GOLPUT PADA PILKADA LAMONGAN 2010

Mir'atunnisa' Afnaniyati

IAIN Sunan Ampel Surabaya

miraafnani@gmail.com

Abstract

This article is based on research about the influence of abstention of education voters in local election 2010 in Lamongan. This study was conducted to determine the level of education voters and the effect to educational level on points for abstaining voters in the election. With a quantitative approach that emphasizes the analysis of numerical, data (numbers) are processed with statistical method, and the studied population is 937 people and samples taken at random are 94 people. The results obtained from this study voters who are 17-year-old (adolescent) with graduate of junior high school, have the character of an unstable and easily influenced, therefore also contribute for making decision in determining the political choice, due to the lack of political education for them.

Keywords: Beginner voters, white group, local elections.

Abstrak

Tulisan ini didasarkan atas penelitian tentang pengaruh pendidikan pemilih pemula golput pada di Pilkada 2010 Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pendidikan pemilih pemula dan efek dari tingkat pendidikan pada poin abstain pemilih pemula dalam pilkada tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisis data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik, populasi yang diteliti adalah 937 orang dan sampel yang diambil secara acak adalah 94 orang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pemula berusia 17 tahun (remaja) yang berpendidikan SMP, memiliki karakter tidak stabil dan mudah dipengaruhi sehingga berpengaruh juga untuk keputusan dalam menentukan pilihan politik, yang disebabkan lemahnya pendidikan politik untuk mereka

Kata kunci: pemilih pemula, golongan putih, pemilu lokal.

Pendahuluan

Pemilihan Umum mempunyai esensi sebagai sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancarkan ke bawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada hakekatnya, pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Jika dipandang dari kaca mata demokrasi, tujuan pemilu adalah kembali berpegang pada prinsip kebijaksanaan yang demokratis, yaitu menjamin kepentingan semua golongan masyarakat. Untuk itu, tujuan pemilu harus dinyatakan dalam fungsi-fungsi utama pemilu yaitu: 1) membentuk pemerintahan perwakilan lewat partai politik pemenang pemilu; 2) Menentukan wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat; 3) pergantian atau pengukuran elit penguasa (Asfar, 2006: 3)

Sebuah pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin politik. Yang dimaksud pemimpin politik di sini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen), baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, maupun bupati. Setidaknya sudah 10 kali Indonesia melaksanakan pemilu dari tahun 1955–2009 untuk memilih pemimpin lembaga eksekutif atau presiden di tingkat pusat .

Penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itu, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (KPU, 2010: 15).

Dalam sebuah pilihan politik, tidak akan terlepas dari aktor yang berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang (masyarakat/rakyat) untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih langsung, partisipasi secara langsung pula atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Rakyat merupakan subyek politik aktif yang menentukan berhasil tidaknya proses pemilu. Salah satunya yaitu memilih pemula.

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah: 1) umur sudah 17 tahun; 2) sudah/pernah kawin; dan 3) purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian (Pahmi, 2010: 53).

Pemilih pemula mempunyai peranan yang penting karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan. Misalnya, jangan sampai yang sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam sebuah negara demokrasi, adanya pemilu merupakan suatu klaim terhadap suatu sistem politik yang dibangun oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemilu itu

sendiri, tidak lepas dari adanya suatu golongan yang tidak berpartisipasi di dalamnya atau biasa disebut golongan putih (golput). Akibat dari banyaknya warga Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya pada tiap momen pemilihan langsung yang dilaksanakan di negeri ini, baik pada pemilihan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, membuat fenomena golput menjadi sebuah pembicaraan menarik. Salah satu kelompok sosial di masyarakat yang rentan untuk menjadi golput adalah mahasiswa.

Hal ini karena tingkat pendidikan yang dimiliki mahasiswa untuk cenderung bertindak secara rasional dalam menentukan sikap politiknya, sikap golput ini karena tidak ada pilihan calon yang layak dan bersih untuk dipilih sehingga mahasiswa menentukan untuk golput, selain itu mahasiswa cenderung bersikap apatis, apolitis, dan kritis terhadap pemilu, serta merupakan kelompok yang biasanya teralienasi dari sistem atau proses politik yang ada.

Dalam penelitian ini, bahasan tentang angka golput di atas akan dikaitkan dengan tingkat pendidikan pemilih pemula dalam pilkada Lamongan 2010. Di Lamongan telah dilaksanakan dua kali pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yaitu tahun 2005 dan 2010. Dari hasil perhitungan suara yang diperoleh adalah adanya peningkatan angka golput yang cukup tinggi. Dalam pilkada Lamongan 2010, angka golputnya mencapai 36,10% atau sebanyak 379.769 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan jumlah pemilih yang terdaftar adalah 1.052.133 orang (Mahfud, wawancara: 28 Maret 2011)

Tingginya angka golput pada pilkada Lamongan 2010 ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu kurangnya kesadaran politik pemilih dan pemilih yang sudah terdaftar tidak ada di tempat pada saat pilkada Lamongan 2010 (sedang bekerja di luar daerah/perantauan).

Fenomena golput ini menarik untuk diteliti, terutama jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Peneliti mengkhususkan bahasan hanya pada pemilih pemula atau

pemilih yang baru mendapatkan hak pilihnya yang berusia 17 tahun dan masih mengenyam pendidikan SMA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku memilih pada pemilih pemula dalam pemilu, khususnya pilkada di Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring. Selain itu, untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan pemilih pemula dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimana tingkat pendidikan pemilih pemula di kecamatan Kedungpring kab. Lamongan?; *kedua*, apa saja faktor yang mempengaruhi golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kabupaten Lamongan?; dan *ketiga*, adakah pengaruh tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Dalam penelitian ini, terdapat 2 teknik analisis yang digunakan, yaitu: 1) teknik analisis non-statistik, yaitu teknik analisis yang bertujuan mencari konklusi dari data yang ada, sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan pertama dan kedua dari rumusan masalah di atas yaitu, tingkat pendidikan pemilih pemula di Kecamatan Kedungpring dan faktor yang mempengaruhi golput pada pilkada Lamongan 2010; 2) teknik analisis statistik, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ketiga yaitu pengaruh tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring.

Konsep Golput

Golput (golongan putih) adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Untuk itu, ada sekelompok orang yang sudah sejak awal tidak mau didaftarkan dirinya sebagai pemilih sehingga tahapan Pemilu ini tidak diikutinya. Namun demikian, ada juga sekelompok orang yang sudah terdaftar sebagai pemilih namun

mereka tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara (Pahmi, 2010: 65).

Golput dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, antara lain.

1. Adanya kejenuhan politik dengan banyaknya pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan kepala desa menimbulkan kejenuhan politik. Masyarakat merasa pemilihan tersebut membosankan.
2. Tidak adanya harapan yang pasti dan kongkret dari Pemilu tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan apa-apa bagi kehidupan mereka, baik perubahan ekonomi maupun perubahan sosial budaya untuk kesejahteraan mereka.
3. Hilangnya *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada politisi, janji-janji politik yang dilakukan oleh politisi ternyata tidak terbukti, membuat masyarakat enggan untuk ikut terlibat lagi dalam Pemilu, apalagi politisi yang telah mengumbar janji mencalonkan lagi di daerah tersebut.
4. Kebutaan politik, yaitu kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem Pemilu dan perubahan-perubahan yang terkait dengan Pemilu tersebut sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara benar, bahkan menyebabkan mereka enggan untuk datang menggunakan hak pilih mereka.
5. Sistem politik yang ruwet. Dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Sistem Pemilu yang berbelit-belit dengan partai yang banyak, dengan aturan yang berubah-ubah menyebabkan masyarakat pemilih sulit untuk mengerti.
6. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan panwas. Tidak profesional dan kurangnya keadilan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara dalam melakukan proses-proses tahapan pemilihan umum menyebabkan masyarakat

tidak memiliki keyakinan dan antipati kepada lembaga tersebut.

7. Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilu. Penggunaan fasilitas negara oleh politisi yang sedang menduduki jabatan menyebabkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang memiliki dukungan yang berbeda dengan pihak penguasa saat itu. Begitu juga dengan PNS, POLRI, dan TNI yang berpihak kepada pejabat penguasa juga akan menimbulkan antipati bagi masyarakat yang berbeda dukungan dengan pemerintah. Untuk itu, sulit bagi masyarakat untuk datang ke TPS karena dikhawatirkan suara dan pilihan mereka menjadi sia-sia (Pahmi, 2010: 66-68).

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi adalah bahwa setiap orang mengetahui diri dan dunianya secara lebih baik daripada orang lain termasuk para ahli elite politik yang membuat keputusan. Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator, artinya mereka yang secara aktif ikut terlibat dalam proses politik, yaitu komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat (Ardial, 2010: 64).

Partisipasi politik menurut Rosseau terdiri atas dua jenis. *Pertama*, para pengamat yang memperhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan diantara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. *Kedua*, partisipasi aktif adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen atau di luar parlemen (Ardial, 2010: 66).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang. *Pertama*, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. *Kedua*, menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

Teori Pilihan Rasional

Teori ini dikemukakan oleh James S. Coleman. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor (Ritzer & Goodman, 2007: 394).

1. Pendekatan dalam Perilaku Memilih.

Ada beberapa pendekatan dalam memahami perilaku memilih, yaitu sebagai berikut.

a. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik seseorang (seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya (Asfar, 2006; 43). Pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

b. Pendekatan Psikologis.

Pendekatan ini muncul dikarenakan adanya reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologis sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya. Apalagi, pendekatan sosiologis umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai politik tertentu sementara yang lain tidak (Asfar, 2006: 141).

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi, terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup

menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu pendekatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

c. Pendekatan Rasional.

Dalam pendekatan rasional, para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemadharatan yang sekecil-kecilnya (Asfar, 2006: 146).

Jika melihat perilaku pemilih pemula melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat bahwa pemilih pemula menggunakan ilmu ekonomi sebagai panutannya. Hal ini dapat dilihat ketika pemilih pemula memilih kandidat yang dapat memberinya keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya, memilih kandidat yang memberinya uang atau materi sebagai harga dari suara yang akan digunakannya. Selain itu, pemilih pemula juga cenderung memilih kandidat berdasarkan figurinya bukan kemampuannya sehingga pemilih pemula juga cenderung mudah dimanfaatkan oleh partai politik.

Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula di Kecamatan Kedungpring

Jika dilihat dari pemilih pemula di Kecamatan Kedungpring khususnya yang berusia 17 tahun (remaja) dan sedang menempuh pendidikan SMA ketika pilkada Lamongan 2010 berlangsung, mereka antusias mengikuti kegiatan pemilu, terutama menggunakan hak suara mereka, walaupun ada sebagian pemilih pemula lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada mengikuti pencoblosan saat pilkada.

Keikutsertaan para pemilih pemula bisa dilatarbelakangi banyak faktor, misalnya mencoblos pilihan yang sama dengan orang tuanya, ikut-ikutan teman sebayanya, bahkan dengan pertimbangan mendapatkan uang dan materi dari partai politik yang membutuhkan dukungannya. Jika dilihat dari pendidikan politik pemilih pemula di Kecamatan Kedungpring (pelajar SMA) memang masih kurang maksimal. Pendidikan politik sebagian didapat dari pelajaran sekolah (mata pelajaran kewarganegaraan) dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, sedangkan sosialisasi dari KPU masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana sosialisasi KPU sehingga sosialisasi yang dilaksanakan belum merata atau hanya SMA/SMK di Lamongan kota saja. Sedangkan di kecamatan-kecamatan kecil seperti Kedungpring, sosialisasi belum terlaksana. Hal ini bisa berpengaruh terhadap perilaku memilih para pemilih pemula yang pada dasarnya belum faham tentang makna pemilu yang sesungguhnya.

Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring.

Golput memang menjadi fenomena yang mencengangkan, ketika partisipasi pemilih pemula juga mengalami penurunan. Kurangnya kesadaran pemilih pemula di Kecamatan Kedungpring bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang makna Pemilu yang sesungguhnya. Kurangnya sosialisasi KPU terhadap pemilih pemula, kurang maksimalnya penanaman nilai-nilai demokratis di sekolah, dan di lingkungan sekitar (keluarga dan teman sebaya) bisa menjadi penyebab golput di kalangan pemilih pemula. Remaja yang cenderung masih labil dan mudah terpengaruh dapat ikut-

ikutan menjadi golput ketika keluarga atau temannya tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.

Analisis Statistik dan Hipotesis

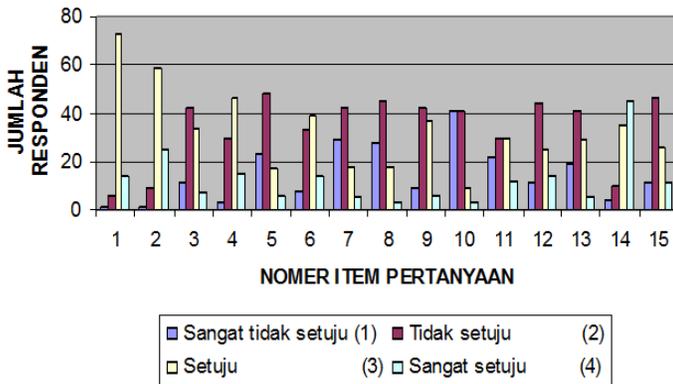
Data tentang ada tidaknya pengaruh tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring diperoleh dari data hasil angket yang terdiri dari 15 pertanyaan tentang tingkat pendidikan pemilih pemula dan 15 pertanyaan tentang konsep golput. Setelah menyebarkan angket kepada para pemilih pemula yang berusia 17 tahun sebanyak 94 responden secara random, dan mendapatkan jawaban dari mereka, maka berdasarkan 94 responden tersebut diperoleh data tentang tingkat pendidikan pemilih pemula (variabel X) dan golput (variabel Y). Data tersebut kemudian dihitung berdasarkan skor yang telah ditentukan. Perhitungan skornya adalah sebagai berikut.

Jawaban SS	=	4
Jawaban S	=	3
Jawaban TS	=	2
Jawaban STS	=	1

Jawaban dari hasil angket dalam penelitian ini juga dapat dijelaskan dalam bentuk grafik, seperti yang tersaji di bawah ini.

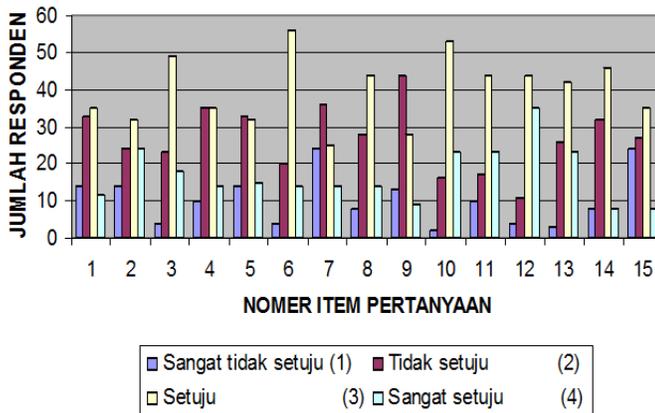
Gambar 1.

Diagram Hasil Angket Tentang Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula



Gambar 2.

Diagram Hasil Angket Tentang Golput



Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara dua variabel ini, dari dua tabel tabulasi hasil angket tentang tingkat pendidikan pemilih pemula dan golput di atas kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dengan bantuan SPSS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel tingkat pendidikan pemilih pemula dan variabel angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring terdapat pengaruh/hubungan yang signifikan. *Out put* yang dihasilkan dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut.

Tabel 1.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di kec. Kedungpring	40.0319	4.83591	94
Tingkat pendidikan pemilih pemula	36.8511	4.50318	94

Pada tabel *Deskriptive Statistic* di atas, diperoleh informasi tentang:

1. Rata-rata (mean) Angka golput pada Pilkada Lamongan 2010 (dengan jumlah responden (N) 94) adalah 40,03 dengan standar deviasi 4,84.
2. Rata-rata (mean) Perilaku Pemilih (dengan jumlah responden (N) 94) adalah 36,85 dengan standar deviasi 4,50.

Tabel 2.

Correlations

		Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kec. Kedungpring	Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula
Pearson Correlation	Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kec. Kedungpring	1.000	.324
	Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula	.324	1.000
Sig. (1-tailed)	Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kec. Kedungpring	.	.001
	Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula	.001	.
N	Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kec. Kedungpring	94	94
	Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula	94	94

Pada tabel *Correlation* di atas, memuat korelasi/pengaruh antara variabel Kegagalan Pencalonan KH. Dimiyati dengan Perilaku Pemilih.

3. Dari tabel tersebut dapat diperoleh besarnya korelasi (*r hitung*) = 0,324. Hasil ini selanjutnya diperbandingkan dengan harga *r tabel* pada taraf kesalahan tertentu. Bila taraf kesalahan ditetapkan 1%, (taraf kepercayaan 99%) dan N = 94, maka harga *r tabel* = 0,263. Harga *r tabel*

dengan r *hitung* ditentukan sebagai berikut:

“Ketentuannya bila r *hitung* < r *tabel*, maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Tetapi sebaliknya bila r *hitung* > r *tabel*, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.”

Ternyata harga r *hitung* > r *tabel*, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi kesimpulannya ada pengaruh antara tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring.

- Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan harga r *hitung* dengan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisiensi korelasi. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan yang ada.

Tabel 3.

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
Antara 0,00 sampai 0,199	Sangat rendah
Antara 0,20 sampai 0,399	Rendah
Antara 0,40 sampai 0,599	Sedang/cukup
Antara 0,60 sampai 0,799	Kuat
Antara 0,80 sampai 1,000	Sangat kuat

Berdasarkan tabel di atas, maka koefisiensi korelasi yang ditemukan sebesar 0,324 termasuk pada kategori “Rendah”. Jadi terdapat pengaruh yang rendah antara “Tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring”. Pengaruh tersebut baru berlaku untuk sampel yang berjumlah 94 orang.

Tabel 4.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.324 ^a	.105	.095	4.60045	1.627

- *Predictors: (Constant)*, tingkat pendidikan pemilih pemula
- *Dependent Variable:* angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di kec. Kedungpring.

Pada 259able Model Summary, diperoleh hasil R Square sebesar 0,105, angka ini adalah hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi, atau $0,324^2 = 0,105$. R Square disebut juga dengan koefisien determinasi, yang berarti 10,5% variabel angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pemilih pemula, sisanya sebesar 89,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 5.

Tabel Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.224	3.933		6.923	.000
	tingkat pendidikan pemilih pemula	.348	.106	.324	3.281	.001

- *Dependent Variable:* angka golput pada pilkada lamongan 2010 di kec. Kedungpring

Pada tabel *Coefficients* diperoleh hasil Uji-t. Hasil dari Uji-t ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh, yaitu apakah pengaruh yang ditemukan itu juga berlaku untuk seluruh populasi yang berjumlah 973 orang.

Tabel 6.

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi antara Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula (X) terhadap Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring (Y).

N	Koefisien Korelasi (r _{xy})	t hitung	t table	
			α =0,05	α =0,01
94	0,324	3,281	1,980	2,617

Berdasarkan tabel perhitungan *tes t* diatas, didapatkan harga *t hitung* sebesar = 3,281. Harga *t hitung* tersebut

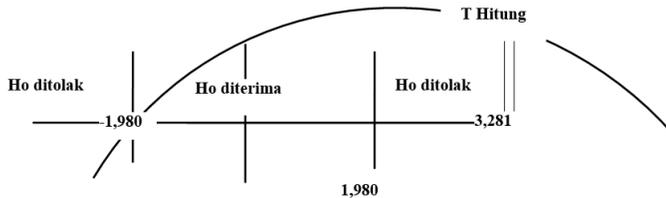
kemudian dibandingkan dengan harga *t tabel*. Harga *t tabel* dengan $dk = n-2 = 94 - 2 = 92$ pada taraf signifikansi ($= 0,05$) adalah 1,980. Harga *t tabel* dengan *t hitung* ditentukan sebagai berikut.

“Ketentuannya bila *t hitung* lebih kecil dari *t tabel* (*t hitung* < *t tabel*), maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak. Tetapi sebaliknya bila *t hitung* lebih besar dari *t tabel* (*t hitung* > *t tabel*) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. “

Jadi dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat signifikan. Hal ini karena *t hitung* 3,281 > daripada *t tabel* 1,980. Untuk mempermudah melihat di mana kedudukan harga *t hitung* dan *t tabel*, maka dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini.

Gambar 5.

Letak *t hitung* dan *t tabel*



Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak. Berarti terdapat hubungan yang signifikan antara Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula terhadap Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring, artinya koefisien tersebut dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku pada populasi sebesar 937 orang.

Penyebab Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring

Golput merupakan sekelompok/individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Pemilih pemula yang masih remaja bisa menjadi golput dengan tidak

menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dipicu karena pemilih pemula (remaja) bisa terpengaruh dengan pilihan orang tua atau teman sebayanya. Ketika orang tua/temannya menjadi golput maka dengan karakter remaja yang mudah terpengaruh dan meniru (imitasi), maka remaja tersebut akan ikut-ikutan menjadi golput.

Di Kecamatan Kedungpring, kurangnya sosialisasi dari KPU juga bisa menjadi penyebab kurangnya pemahaman pemilih pemula terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam Pilkada. Pemilih pemula juga kurang memaknai arti dari Pemilu sendiri karena dirasa tidak bermanfaat bagi mereka.

Dilihat dari teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman, yaitu aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan maksud (Ritzer & Goodman, 2007: 394). Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Teori ini jika dihubungkan dengan pilihan golput oleh pemilih pemula maka, pemilih pemula memang cenderung terpengaruh dan meniru lingkungan sekitarnya yaitu keluarga dan teman sebaya.

Hal ini bisa berpengaruh juga ketika memutuskan untuk golput. Kelompok sebayanya memilih golput maka dia juga memilih golput. Tujuannya adalah rasa kesetiakawanan remaja terhadap kelompok sebayanya dan agar keberadaan mereka diakui di dalam kelompok sebayanya. Tujuan ini (rasa setia kawan dan pengakuan dari kelompok sebaya) dianggap rasional ketika masuk dalam tingkat pemikiran remaja itu sendiri. Karena memang kelompok sebaya merupakan lingkungan kedua yang penting setelah orang tua.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Pemula terhadap Angka Golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah antara variabel X terhadap variabel Y. Nilai r hitung adalah 0,32 jika dibandingkan dengan nilai r tabel dengan taraf kesalahan 1% adalah 0,263. Maka nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel, berarti terdapat hubungan positif (pengaruh) dan nilai koefisien korelasi antara tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada Pilkada Lamongan 2010 di kecamatan kedungpring.

Pada tabel Model Summary, diperoleh hasil R Square sebesar 0,105, angka ini adalah hasil pengkuadratan dari harga koefisien korelasi, atau $0,324^2 = 0,105$. R Square disebut juga dengan koefisien determinasi, yang berarti 10,5% variabel angka golput pada pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pemilih pemula, sisanya sebesar 89,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil 10,5% tersebut masuk dalam kategori pengaruh yang rendah. Hal ini sesuai dengan pendekatan sosiologis yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi perilaku memilih pemilih pemula.

Tingkat pendidikan pemilih pemula, khususnya remaja yang masih menjalani pendidikan SMA, karakternya mudah terpengaruh dan meniru (imitasi) terhadap lingkungan sekitarnya yaitu keluarga dan teman sebaya. Ketika temannya golput maka dia ikut-ikutan golput. Perilaku pemilih pemula ini, jika dilihat dari teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman, yaitu aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan maksud, maka pemilih pemula memilih ikut golput karena bertujuan sebagai rasa kesetiakawanan terhadap kelompok sebaya dan agar keberadaan mereka diakui oleh anggota kelompok sebaya yang lain.

Penutup

Pemahaman yang dapat disimpulkan dari rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan diatas sebagai berikut.

1. Pemilih adalah orang yang menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (pemilu).

Pemilih pemula yang berusia 17 tahun (remaja) cenderung mempunyai karakter yang labil dan mudah terpengaruh. Hal ini berlaku juga ketika mereka menentukan pilihan pada pilkada Lamongan 2010. Penentuan pilihan pemilih pemula dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman sebaya. Di Kecamatan Kedungpring, pemilih pemula ikut tidak memilih ketika teman sebayanya juga tidak memilih. Selain itu, seorang anak juga ikut-ikutan pilihan yang sama dengan pilihan orang tuanya.

2. Di Kabupaten Lamongan angka golputnya mencapai 36,10%. Sedangkan di Kecamatan Kedungpring mencapai 38,13% dari jumlah keseluruhan pemilih. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu kurangnya kesadaran pemilih dan pemilih tidak berada di tempat saat pelaksanaan Pilkada 2010 berlangsung. Masyarakat Lamongan memang termasuk masyarakat perantauan karena sebagian masyarakatnya yang sekolah dan bekerja di luar daerah sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu.
3. Terdapat pengaruh yang rendah antara tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap angka golput pada Pilkada Lamongan 2010 di Kecamatan Kedungpring yaitu sebesar 10,5%. Sedangkan sisanya 89,5% ditentukan oleh faktor lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Daftar Rujukan

- Amin, M. Tatang. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Azwar, Syaifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Donald, Parulian. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Karim, Rusli. 1991. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih, dan Kepartaian*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern Edisi ke-6*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zamroni. 1999. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Litbang Kompas/Gianie, "Memetakan Minat pemilih pemula", (Online: www.Indonesiamemilih.com) diakses tanggal 17 Mei 2011.
- Sekretariat Jenderal KPU Biro Teknis dan Hupmas. 2010. *Modul: Pemilu untuk Pemula*. Jakarta: Penerbit Komisi Pemilihan Umum.
- Tim Penyusun Berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan nomor 149 tahun 1992. 1994. *Lamongan Memayu Raharjaning Praja*. Surabaya: Perintis Graphic Art.
- Tim Penyusun Kamus. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi III cet. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Buku. 2009. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S1)*. Edisi Revisi. Surabaya.